

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA DAYA SAING DENGAN  
KESERASIAN BELANJA DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**Daniel Tonu<sup>1</sup>  
I Dewa Nyoman Badera<sup>2</sup>  
I Ketut Budiarta<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

Email: tonudani@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Daya Saing Daerah dengan Keserasian Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Pemoderasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pusat Statistik NTT dan *situs* Website Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri. Obyek yang digunakan adalah Daya Saing Daerah dengan lingkup pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rentang waktu Tahun 2007 s/d 2012 dan menggunakan data sekunder. Metode observasi non partisipasi dengan teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi daerah, Keserasian Belanja Daerah, dan Kemandirian keuangan daerah secara simultan berhasil mempengaruhi Daya Saing. (2) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh tetapi signifikan pada daya saing. (3) keserasian belanja daerah tidak berhasil mempengaruhi daya saing. (4) kemandirian keuangan daerah tidak berhasil mempengaruhi daya saing. (5) Semakin meningkat Keserasian Belanja Daerah semakin meningkat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah berhasil mempengaruhi daya saing daerah. (6) semakin meningkat Kemandirian Keuangan Daerah semakin meningkat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi tidak berhasil mempengaruhi Daya Saing Daerah, dan (7) semakin meningkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Daerah semakin kuat Pertumbuhan Ekonomi juga tidak berhasil mempengaruhi daya saing.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Keserasian Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Konsumsi per Kapita.

**ABSTRACT**

This study aims to determine the Effects of regional Economic Growth to the Competitiveness with Harmony Expenditure, The Regional Financial Independence As a moderating. The research location is in the main Statistics Office of NTT and the General Directorate of Balance Fiscal Web site in Regional Office. The object which is used in this study is the scope of the Regional Competitiveness government district/city in the province of East Nusa Tenggara, in the range of year 2007 until 2012, using the secondary data. The method of data collection is using the non-participation observation, with sampling technique using purposive sampling. The data analysis technique used is Moderated Regression Analysis (MRA) which is a special application of multiple linear regression in regression equation contains elements of interaction (multiplication of two or more independent variables). The results showed that (1) The regional economic growth, Harmony Expenditure and Financial Independence area simultaneously effect on positive and significant Competitiveness. (2) The economic growth gives a negative effect significantly on the competitiveness. (3) The compatibility shopping area turns to negative effect and it is not significant on the competitiveness. (4) The independence of financial area turns to negative effect and it does not show a significant result on competitiveness. (5) The increasing of shopping area compatibility will strongly influence the regional economic growth and result a positive effect on the competitiveness of the region. (6) The Higher Regional Financial Independence improve the moderating of economic growth influence which positively impact but it does not show a significant effect on the Regional Competitiveness, and (7) the high level in regional financial independence increases the negative influence on it, but it is not significant to economic growth competitive

**Keywords:** Economic Growth, Harmony Expenditure, Financial Independence, Regional Consumption per Capita.

## PENDAHULUAN

Otonomi Daerah mewajibkan pemerintah untuk menata dan mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan ciri dan potensi daerah secara demokratis, transparan dan akuntabel. Disisi lain, pemerintah wajib menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintahannya demi pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam rangka menjalankan amanat rakyatnya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab sekaligus memperhatikan azas keadilan, kepatutan.

Daya saing (DSD) merupakan tujuan utama Pemda melalui peningkatan pendapatan, pendapatan asli daerah. Menurut Brata (2004) ada dua komponen yaitu PAD dan bagian sumbangan dan bantuan penerimaan daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi selalu diukur menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto. Gaspersz, Feonay (2003) dalam Kuncoro, (2004), bahwa indikator ini lebih efektif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menekankan pada kemampuan negara atau daerah melalui PDB/PDRB agar dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk.

Pemerintah Daerah memiliki hak dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari pemungutan pajak, restribusi daerah serta memperoleh dana perimbangan, dan melakukan pinjaman. Dalam melaksanakan hak tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban; (a) mengelola sumber keuangan daerah secara efektif, efisien; (b) mensinergitaskan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional; (c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Disamping itu, desentralisasi juga bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas pemerintahan. Oleh karenanya pemerintah daerah harus dan wajib meningkatkan percepatan pembangunan daerah, penyediaan kualitas dan kuantitas pelayanan yang lebih baik serta mendorong tata kelola pemerintahan lebih akuntabel terhadap masyarakat.

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa, harapan besar dari pemerintah dalam membangun daerah semakin jauh dari kenyataan, yang terjadi hanyalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai dampak dari ketidakberdayaan PAD dalam membiayai belanja daerah sehingga salah satu unsur reformasi adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.. Bappenas, (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki cukup mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun ada daerah lain yang selalu menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. (Jhingan, 2000) ada dua faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Pemerintah pusat selalu mengantisipasi terjadinya kesenjangan fiskal pada setiap daerah, oleh karenanya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah dengan tujuan agar tercapainya standar pelayanan publik. demikian Simanjuntak dalam Sidik (2002) senada dengan pendapat beberapa ahli, seperti: Linn (1992), Oates (1993), Bahl dan Gramlich (1993), Bird dan Wallich (1995), Martnez dan McNab (2001). bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya telah diuraikan bahwa Derajat otonomi fiskal yang menerangkan rasio PAD terhadap total belanja daerah, berguna untuk menerangkan

sampai sejauh mana PAD Kota Kupang mampu memberikan kontribusi terhadap realisasi pembelanjaan daerahnya setiap tahun berdasarkan sumber-sumber keuangan yang asli. Rata-rata derajat otonomi fiskal (DOF) Kota Kupang adalah 7,71 persen selama tahun 1997-2001. Rasio ini dikategorikan sangat kurang karena berada di bawah rasio 25 persen. Rata-rata IKB selama 1997-2001 adalah sebesar 23,03 persen, hal ini berarti pemerintah kabupaten rata-rata hanya mengalokasikan dana sebesar 23,03 persen untuk belanja publik dari total belanja daerah dan dapat dikategorikan kurang serasi, Matheus (2002). Hal yang sama pada lokus yang berbeda dijelaskan oleh Petrus (2001) bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBD yang dicapai Kabupaten Manggarai adalah sebesar 102,98 persen dengan predikat sangat efektif, sementara Kabupaten Ende adalah 94,70 persen dengan kategori efektif. Jika dibanding dengan Kabupaten Sikka tingkat efektivitas tidak jauh berbeda, dengan nilai 91,33 persen dikategorikan efektif.

Riset ini dimotivasi oleh adanya dugaan bahwa (1) meningkatnya keserasian belanja daerah seperti yang ditekankan dalam *public expenditure management* (Dwirandra, 2011 dalam Fozzard, 2001) tidak secara langsung meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Kondisi ini tidak dapat dihindari bahwa adanya kekuatan atau keadaan politik dan berbagai bentuk kebijakan yang sifatnya pragmatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan tersebut belum tentu sejalan dengan pertumbuhan kemampuan ekonomi daerah. Inilah yang memotivasi mengapa penelitian ini diorientasikan untuk menguji pengaruh moderasi keserasian belanja daerah dalam meningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada daya saing daerah dan kemandirian keuangan daerah meningkatkan pengaruh moderasi pertumbuhan ekonomi pada daya saing serta tingginya kemandirian keuangan daerah

meningkatkan pengaruh moderasi keserasian belanja daerah pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Penelitian ini berbeda dengan riset-riset lainnya, *pertama*, penelitian ini menguji dampak moderasi keserasian belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah (*three-way interaction test*) terhadap daya saing daerah. *Kedua*, penelitian ini menguji dampak moderasi keserasian belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah dan tingginya keserasian belanja daerah, tingginya kemandirian keuangan daerah (*three-way interaction test*) terhadap daya saing daerah, serta Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga merupakan pembeda. Isu Penelitian ini adalah perbedaan prediksi antara teori keagenan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap daya saing daerah yang di moderasi dua variabel.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian adalah pertama, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (BPS NTT), dan kedua, situs *website* Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri. Sumber Data meliputi data kuantitatif; Sajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan data kualitatif berupa gambaran umum Daerah Otonom dan Karakteristik Desentralisasi Fiskal di Nusa Tenggara Timur. Metoda Pengambilan Sampel ialah *purposive sampling* dengan kriteria meliputi; (1) daerah yang telah menjadi Daerah Otonom pada akhir tahun 2006, (2) ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dalam rentang waktu 2007 s/d 2012, (3) pertumbuhan PDRB dan konsumsi per kapita. Observasi Non Partisipasi digunakan sebagai Teknik Pengumpulan Data, sedangkan Teknik Analisis Data adalah *Moderated Regression Analysis* dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* 16.0 (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden (N) 95 responden, dari jumlah responden tersebut diketahui nilai terendah Variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah 2,48, nilai tertingginya 8,81, nilai rata-ratanya (*mean*) adalah 5,022 dan deviasi standarnya 1,054. Nilai terendah Variabel Kekeragaman Belanja Daerah adalah 8,99, nilai tertingginya 43,05, nilai rata-ratanya (*mean*) adalah 23,42 dan deviasi standarnya 8,223. Nilai terendah Variabel Kemandirian Keuangan Daerah adalah 0,06, nilai tertingginya 36,37, nilai rata-ratanya (*mean*) adalah 21,44 dan deviasi standarnya 6,693. Variabel Daya Saing Daerah memiliki nilai terendahnya adalah 3,80, nilai tertingginya 45,38, nilai rata-ratanya (*mean*) adalah 27,544 dan deviasi standarnya 9,046. Untuk Variabel moderasi KBD\*PE memiliki nilai terendah 43,86, nilai tertinggi 63,85, rata-rata (*mean*) adalah 1.122 dengan nilai standar deviasinya sebesar 14,759. Dan untuk KKD\*PE memiliki nilai terendah adalah 0,01, nilai tertinggi 19,241, rata-rata (*mean*) 1,052 dan standar deviasinya sebesar 36,487. Sedangkan untuk KKD\*KBD\*PE memiliki nilai terendah 0,50, nilai tertinggi 1,12E5, dengan nilai rata-rata 2,431, standar deviasinya 32,199. Ditampilkan pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PE	95	2,48	8,81	5,0223	0,10818	1,05441
KBD	95	8,99	43,05	23,4241	0,84374	8,22380
KKD	95	0,06	36,37	21,4463	0,68675	6,69366
DSD	95	3,80	45,38	27,5445	0,92819	9,04692
KBD*PE	95	43,68	63,65	1,1229E3	1,51820	14,75920
KKD*PE	95	0,01	192,41	1,0529E2	3,74355	36,48765
KKD*KBD*PE	95	0,50	1,12E5	2,4313E4	3,33332	32,19959
Valid N (listwise)	95					

Sumber : hasil penelitian diolah

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Uji pengaruh pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) terhadap daya saing ( $Y$ ) diperoleh *P-Value* = 0,00 pada  $\alpha = 5\%$  dengan koefisien beta 3.932, yang berarti bahwa

pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap daya saing (Y). Hasil uji ini berarti menerima  $H_2$  yang menyatakan bahwa PE ( $X_1$ ) berpengaruh positif pada DSD (Y).

(2) Uji pengaruh KBD ( $X_2$ ) terhadap DSD (Y) diperoleh  $P\text{-Value} = 0,512$  pada  $\alpha = 10\%$  dan koefisien beta 0,068, yang berarti bahwa keserasian belanja daerah ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap daya saing (Y). Hasil uji ini berarti menerima  $H_3$  yang menyatakan bahwa KBD ( $X_2$ ) berpengaruh positif pada DSD (Y).

(3) Uji pengaruh KKD ( $X_3$ ) terhadap daya saing (Y) diperoleh  $P\text{-Value} = 0,935$  pada  $\alpha=10\%$  dan koefisien beta 0,011, yang berarti bahwa KKD ( $X_3$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap DSD (Y). Hasil uji ini menerima  $H_4$  yang menyatakan bahwa KKD ( $X_3$ ) berpengaruh positif pada DSD (Y).

Sedangkan pengujian dilakukan pada model interaksi variabel pertumbuhan ekonomi dan keserasian belanja daerah ( $X_1X_2$ ), pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah ( $X_1X_3$ ), pertumbuhan ekonomi, keserasian belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah ( $X_1X_2X_3$ ) pada daya saing dapat dijelaskan bahwa:

(1) Hasil uji regresi pengaruh interaksi pertumbuhan ekonomi dan keserasian belanja daerah ( $X_1X_2$ ) diperoleh  $P\text{-Value} = 0,066$  pada  $\alpha = 10\%$  dan koefisien beta 0.259, yang berarti tingginya keserasian belanja daerah ( $X_3$ ) meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) terhadap daya saing (Y). Karena variabel moderasi (Keserasian Belanja Daerah) merupakan *quasi Moderator* yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor (Pertumbuhan Ekonomi) dan variabel tergantung (Daya Saing) dimana variabel *Moderasi* semu berinteraksi dengan variabel prediktor sekaligus menjadi variabel prediktor, maka hasil uji ini

berarti diterima  $H_5$  yang menyatakan bahwa Semakin meningkat Keserasian Belanja Daerah semakin kuat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Daya Saing Daerah. kondisi ini membuktikan bahwa: a) meningkatnya alokasi belanja modal, sebagai akibat meningkatnya PAD, bukan pada komponen belanja modal untuk proyek modal fisik yang dapat menyediakan lapangan kerja, b) meningkatnya alokasi belanja modal, sebagai akibat meningkatnya PAD, memang dialokasikan pada komponen belanja modal namun pada proyek modal fisik tidak ada berkelanjutan. Tentunya kedua kondisi di atas menjadikan peningkatan belanja modal justru tidak cukup menyediakan lapangan kerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

- (2) Hasil uji regresi pengaruh interaksi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah ( $X_1X_3$ ) diperoleh  $P\text{-Value} = 0,114$  pada  $\alpha=5\%$  dan koefisien beta 0.332, yang berarti tingginya kemandirian keuangan daerah ( $X_3$ ) meningkatkan pengaruh positif, tetapi tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) terhadap daya saing ( $Y$ ). Karena variabel moderasi (Kemandirian Keuangan Daerah) merupakan *pure moderator* yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor (Pertumbuhan Ekonomi) dan variabel tergantung (Daya Saing) dimana variabel *Moderasi* murni berinteraksi dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel prediktor, maka hasil uji ini berarti menolak  $H_6$  yang menyatakan bahwa Tingginya Kemandirian Keuangan Daerah meningkatkan pengaruh moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Daya Saing Daerah. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan kecilnya proporsi pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh PAD terhadap penurunan tingkat daya saing.



(3) Hasil uji regresi pengaruh interaksi pertumbuhan ekonomi, keserasian belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah ( $X_1X_2X_3$ ) diperoleh  $P\text{-Value} = 0,028$  pada  $\alpha = 10\%$  dan koefisien beta 0.007, yang berarti tingginya kemandirian keuangan daerah ( $X_3$ ) meningkatkan pengaruh positif signifikan, pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) terhadap daya saing ( $Y$ ). Hasil uji ini berarti menerima  $H_7$  yang menyatakan bahwa Tingginya Kemandirian Keuangan Daerah meningkatkan pengaruh moderasi Keserasian Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan kecilnya proporsi pendapatan dari retribusi daerah terhadap total penerimaan daerah sehingga daya dorongnya kecil untuk pengaruh PAD terhadap penurunan tingkat daya saing.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditampilkan pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Pengujian Partial dan Interaksi (MRA)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49,100	5,830		8,422	0,000
	PE	3,932	0,821	0,458	4,790	0,000
	KBD	0,068	0,103	0,061	0,659	0,512
	KKD	0,011	0,129	0,008	0,082	0,935
	PE*KBD	0,259	0,139	1,447	1,861	0,066
	PE*KKD	0,332	0,208	1,282	1,595	0,114
	PE*KBD*KKD	0,007	0,003	1,024	2,230	0,028

Sumber : hasil penelitian diolah

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi, keserasian belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada daya saing.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada daya saing daerah.

3. Keserasian belanja daerah pada daya saing, hasilnya menunjukkan keserasian belanja daerah tidak berpengaruh pada daya saing.
4. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh pada daya saing.
5. Semakin meningkat Keserasian Belanja Daerah semakin kuat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Daya Saing Daerah.
6. Tingginya Kemandirian Keuangan Daerah meningkatkan pengaruh moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Daya Saing Daerah, hasil uji ini menolak hipotesis enam.
7. Tingginya Kemandirian Keuangan Daerah meningkatkan pengaruh moderasi Keserasian Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.

## REFERENSI

- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bird, Richard M., Robert Ebel dan Christine Wallich. 1995. *Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies*, Washington DC. World Bank.
- Gaspersz, Vincent dan Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat Dan Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th. II - No. 8 - Nopember 2003.
- Ghozali Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Undip Semarang.
- Gramlich, E.1993. *A Policy maker's guide to Fiscal Decentralization*. *National Tax Journal XLVI*.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. D. Guritno [penerjemah]. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Matheus 2002, Kemandirian Kota Kupang Ditinjau dari Aspek Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta” (tidak dipublikasikan).

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta).

Oates, Wallace E. 1995. *Comment on “Conflict and Dilemmas of Decentralization”* by Rudolf Holmes. The World Bank Research Observer. Hal : 351-353

Petrus 2001, Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).